

Analisis Implikasi Perubahan Kurikulum Terhadap Pembelajaran PPKn Pada Sekolah Jenjang SD

Jauhari EL Madani^{a,1}, Heri Kurnia^{b,2}

^{ab} Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Gambiran, Yogyakarta 55161, Indonesia

¹ jauharielmadani2@gmail.com; ² herikurnia312@gmail.com

* jauharielmadani2@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 18 Januari 2023

Direvisi: 14 Maret 2023

Disetujui: 13 Mei 2023

Tersedia Daring: 1 Juni 2023

Kata Kunci:

Kurikulum

Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan

Pembelajaran

ABSTRAK

Dalam penulisan karya ilmiah berbasis studi literatur ini diharapkan mampu mengatasi kebingungan permasalahan kebijakan kurikulum yang sering berubah merupakan kebijakan dari pemerintah dengan dalih perkembangan zaman dan teknologi sehingga kurikulum juga senantiasa harus mengalami perubahan. Kurikulum memiliki sifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi atau kemampuan sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Hal yang diperlukan dalam proses pendidikan dalam pembuatan kurikulum diharapkan seluruh akademisi pendidikan mampu berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengadakan sosialisasi bagi seluruh komponen masyarakat yaitu peran orang tua, masyarakat dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan Kurikulum karena Kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Dalam mata pelajaran terdapat perubahan juga dari segi penamaan mata pelajaran yang semula Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila, dalam isi muatan nilai – nilai pelajaran juga menambahkan profil pelajar pancasila sebagai penguatan nilai karakter, implementasi kepribadian pancasila sebagai contoh dalam perilaku kehidupan sehari – hari. Dengan perubahan kurikulum tentunya dapat lebih meningkatkan pemahaman materi pembelajaran membuat suatu pandangan baru mengenai program pembelajaran yang harusnya dilakukan, lebih fleksibel, ringkas dan efisien serta mampu menjawab tantangan dalam dunia pendidikan di era perkembangan teknologi digital saat ini. Maka setiap kurikulum dalam pelaksanaannya memerlukan evaluasi di setiap tahunnya guna mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran peserta didik.

ABSTRACT

Keywords:

Curriculum

Civics Education

Learning

In writing scientific papers based on literature studies, it is hoped that it will be able to overcome confusion over the problem of curriculum policies which often change, which are policies from the government under the pretext of the times and technology so that the curriculum must also always experience changes. The curriculum has a dynamic nature and continues to be developed or adapted according to the context and needs of students to build competencies or abilities according to the present and the future. What is needed in the educational process in curriculum development is that it is hoped that all educational academics will be able to collaborate with the community to organize socialization for all components of society,

namely the role of parents, communities and schools must place needs, opinions, experiences, learning outcomes and the interests of students as curriculum development because The curriculum is designed for the needs of learners. In the subjects there were also changes in terms of the naming of the subjects which were originally Pancasila Education and Citizenship changed their names to Pancasila Education, in the contents of the content of the lesson values also added the profile of Pancasila students as strengthening character values, implementing Pancasila personality as an example in the behavior of daily life - day. By changing the curriculum, of course, it can further improve the understanding of learning material, create a new view of learning programs that should be carried out, be more flexible, concise and efficient and be able to answer challenges in the world of education in the current era of digital technology development. So each curriculum in its implementation requires evaluation every year in order to determine the level of success of the learning process of students.

© 2023, Madani, et al

This is an open access article under CC BY-SA license



How to Cite: EL Madani, J., & Kurnia, H. (2023). Analisis Implikasi Perubahan Kurikulum Terhadap Pembelajaran PPKn Pada Sekolah Jenjang SD. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 3(1), 31-39. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v3i1.1846>

1. Pendahuluan

Kurikulum diciptakan pertama kali pada masa kemerdekaan menggunakan istilah dalam bahasa Belanda "*leer plan*" artinya rencana pelajaran, istilah ini lebih populer dibanding istilah "*curriculum*" (bahasa Inggris). Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Sebagai mata pelajaran di sekolah, Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi kurikulum PKn yang berubah – ubah dan tentu saja disesuaikan dengan kepentingan perkembangan zaman dalam suatu negara. Secara historis, epistemologis dan pedagogis, pendidikan kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran Civics dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, mata pelajaran Civics atau kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa, wawasan kebangsaan.

Pembelajaran PPKn pada umumnya memiliki muatan nilai sikap dan karakter yang bisa membangun kesadaran dalam melakukan tindakan sehari – hari namun pembelajaran yang berfokus pada guru hingga saat ini sangat mendominasi di Indonesia. Guru menyampaikan pembelajaran dengan metode ceramah dan kurang mampu memahami kebutuhan peserta didik. Maka tak jarang pembelajaran cenderung membosankan. Dampaknya pencapaian peserta didik menjadi menurun. Seperti halnya hasil penelitian oleh (Alhafiz, 2021) bahwa masih banyak guru mengabaikan konsep pembelajaran yang dipakai, guru lebih cenderung bertumpu pada *teacher centered*, yang pada konsep pendidikan terkini sudah mulai ditinggalkan. Tidak adanya

peran guru dalam mencari data kebutuhan dan minat belajar yang dimiliki peserta didik, dalam proses pembelajaran masih cenderung pada satu pendekatan dan metode mengajar. Sudah seharusnya pada pendidikan terkini guru mulai merubah konsep belajar dari *teacher centered* ke *student centered* (Faiz et al., 2022). Selain pengembangan kurikulum menuju kurikulum prototipe, Kemendikbud-Ristek juga tentu sangat memahami paradigma pendidikan baru yang memasuki konsep pembelajaran abad-21 dimana pendidikan Indonesia perlu merekonstruksi paradigma pendidikan agar dapat eksis di tengah era pendidikan yang mengglobal ini (Faiz & Faridah, 2022).

Dalam perjalanannya kurikulum di Indonesia banyak mengalami perubahan Di akhir tahun 2021, kabar pergantian kurikulum hangat diperbincangkan. Kurikulum 2013 dan kurikulum darurat yang selama ini diterapkan di sekolah akan digantikan dengan kurikulum paradigma baru atau disebut sebagai kurikulum prototipe tahun 2022. Dalam hal ini pula eksistensi kurikulum dipertanyakan apakah urgensi sehingga kurikulum dapat berubah dengan sangat cepat? Perlunya penyesuaian dikala guru menyiapkan segala administrasi yang berkaitan dengan kurikulum. Sehingga diperlukan pemahaman dalam implementasi mengenai pembaruan kurikulum di setiap periode perubahan kurikulum di Indonesia.

Alasan perubahan kurikulum dalam pendidikan biasanya didasarkan pada evaluasi kurikulum yang telah diterapkan sebelumnya. Munculnya kurikulum baru 2022 ini dipicu oleh kondisi pandemi dan juga kritik terhadap kurikulum 2013. Berbagai perubahan kurikulum yang dialami di Indonesia menimbulkan skeptisme bahwa sebenarnya pendidikan belum siap untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan terlebih pada jenjang SD (Sekolah Dasar) yang mana dalam satu sekolah menerapkan beberapa kurikulum yang berbeda, misalnya pada kelas 1 menerapkan kurikulum 2013, sedangkan pada kelas 4,5, dan 6 menerapkan kurikulum merdeka yang terbaru. Pada penerapannya belum bisa serentak pada satu sekolah melainkan hanya di beberapa kelas saja, hal ini tentu menyulitkan guru dalam memberikan materi, jika pada kelas yang berbeda kurikulum tentunya terdapat banyak perubahan dari segi metode, strategi ataupun muatan pelajaran yang ditawarkan.

Maka dari itu pemerintah menawarkan solusi bagaimana untuk menerapkan kurikulum prototipe, peta konsep yang dilaksakan sejak tahun 2021 pemerintah dalam hal ini Kemendikbud-Ristek yaitu Nadiem Makarim sangat serius untuk melaksanakan program Sekolah Penggerak yang secara tujuan ingin mewujudkan Pendidikan di Indonesia yang berdaulat, mandiri dan memiliki kepribadian pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa dan berkebinekaan global. Bukti dari keseriusan pemerintah pada tahun ajaran 2021/2022 melibatkan kurang lebih 2.500 satuan pendidikan di 34 Provinsi dan 110 Kabupaten/ Kota. Sedangkan pada tahun ajaran 2022/2023, diproyeksikan sebanyak 10.000 satuan pendidikan pada 34 provinsi dan 250 Kabupaten/ Kota yang dilibatkan untuk mengikuti program sekolah penggerak (Sutrisno, 2021). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa disisi lain pemerintah juga menyiapkan beberapa terobosan terbaru terkait kurikulum, maka jika dilihat dari perencanaan yang dilakukan oleh kemdikbud tentunya sudah dikaji terlebih dahulu, namun perubahan yang begitu cepat membawa dampak yang kurang signifikan bagi perubahan kurikulum itu sendiri.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan secara konseptual Perubahan Kurikulum mulai diimplementasikan oleh Kemendikbud-Ristek. Harapannya dengan adanya tulisan dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam kurikulum yang di bidang pendidikan dapat memahami dan menjalankan rancangan kurikulum Prototipe sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan di Indonesia dalam menentukan kurikulum yang akan digunakan pada tahun 2022/2023.

2. Metode

Penulisan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi berbasis studi pustaka. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian (Darmalaksana, 2020). Dalam pengumpulan data metode penelitian kualitatif dapat pula berbentuk metode yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tata cara yang digunakan merupakan tata cara riset kepustakaan. Metode pengumpulan informasi dengan mengadakan penelaahan terhadap buku- buku, literatur, catatan, ataupun jurnal dengan bantuan aplikasi *Publish or Perish* guna memudahkan pencarian dari berbagai sumber yang terdapat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dimana informasi yang didapat dari bermacam sumber dicatat buat menguatkan landasan teori riset (Madani & Kurnia, 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

Kurikulum merupakan suatu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan sebagai acuan materi kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Dalam proses diperlukan acuan dalam menetapkan suatu materi pembelajaran oleh karena itu, kurikulum hadir sebagai acuan penerapan proses pembelajaran. semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya.

Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin *curir* yang artinya palri dan *curere* yang berarti tempat berpacu. Sehingga kurikulum diartikan sebagai trek dan lajur yang dilalui untuk mencapai tujuan. Di Indonesia, kurikulum pendidikan mengalami beberapa perubahan. Mulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1994, kurikulum 2006, kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini. Tujuan kurikulum adalah sebagai alat pengajaran untuk menghasilkan peserta didik yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan konsentrasi ilmu. Kurikulum juga memberikan pemahaman kepada siswa tentang sistem pendidikan yang akan dilaksanakan sehingga siswa dapat menentukan pilihan yang diinginkannya pada jenjang berikutnya. Tujuan kurikulum juga untuk menyelaraskan pendidikan di dalam negeri. Membimbing dan mengembangkan peserta didik menjadi pribadi yang cerdas, berkualitas, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan siap bersosialisasi. Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, perubahan kurikulum yang sering membuat pembelajaran menjadi tidak stabil. Pembelajaran cenderung membingungkan banyak perubahan kata benda, isi mata pelajaran dan isi nilai dalam satu pelajaran.

Komponen Kurikulum diantaranya:

1. Tujuan

Komponen pertama dalam kurikulum adalah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan yang tertulis dalam konstitusi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yaitu:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

2. Materi

Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal melainkan harus memerhatikan jenjang pendidikan juga beberapa aspek. Seperti peningkatan agama, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, minat peserta didik, tuntutan dunia kerja, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

3. Interaksi

Interaksi belajar dan mengajar di sekolah antara siswa juga guru menunjang keberhasilan kurikulum. Sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membantu siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

4. Penilaian

Komponen terakhir dari kurikulum adalah penilaian. Penilaian dibutuhkan sebagai gambaran ketercapaian tujuan juga keefektifan penerapan suatu kurikulum ke lingkungan pendidikan. Dengan adanya penilaian, kurikulum bisa dikembangkan untuk mendapat sistem pengajaran yang lebih baik.

Demikian diantaranya komponen yang harus ada dalam proses pembuatan kurikulum tentunya haerus memperhatikan beberapa aspek komponen yang ada dari, tujuan, materi, interaksi, dan penilaian yang semua komponen satu sama lain adalah hal penting. Saat ini proses pengembangan kurikulum di Indonesia mengikuti kebijakan yang diundangkan dalam UU No. 20 tahun 2003, PP No, 19 tahun 2005 dan Permendiknas No. 22, 23, dan 24. Berdasarkan ketetapan tersebut maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia terdiri dari dua langkah pengembangan kurikulum yang dilakukan di Pemerintah Pusat dan pengembangan yang dilakukan disetiap satuan pendidikan. Sebelumnya telah diberlakukan beberapa masa kurikulum seperti kurikulum 1994 dan kurikulum 2004. Kurikulum 2004 disebut sebagai implementasi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sikdiknas) tahun 2003. Dari rangkaian perubahan kurikulum yan terjadi pada tahun 1945 hingga tahun 2013 telah terjadi perubahan kurikulum sebanyak 10 kali yaitu pada tahun 1947 (Rencana Pelajaran yang dirinci dalam rencana pelajaran terurai), tahun 1964 (Rencana Pendidikan Sekolah Dasar), tahun 1968 (Kurikulum Sekolah Dasar), tahun 1973 (Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pengembangan (PPSP), tahun 1975 (Kurikulum Sekolah Dasar), tahun 1984 (Kurikulum 1984), tahun 1997 (Revisi Kurikulum 1984), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)), tahun 2006.

Pengembangan dan perubahan kurikulum tersebut memang harus dilakukan karena kurikulum bukanlah sebuah konsep statis, akan tetapi dinamis dan harus senantiasa menyesuaikan berbagai perubahan dan tantangan yang ada sebagaimana prinsip kurikulum yaitu berubah dan proses terus menerus. Namun perlu diketahui juga ada hal yang mungkin perlu dilakukan dalam perubahan kurikulum harus dikaji dan didalami terlebih dahulu. Kedepannya pemerintah harus senantiasa melakukan evaluasi terhadap perubahan kurikulum, karena menngacu terhadap perkembangan era dan zaman serta kegunaan materi pelajaran yang menyesuaikan. Namun, ini tidak berarti bahwa proses perubahan mudah diterapkan, mengingat kurikulum 2013 sudah berjalan beberapa tahun dan para guru sudah bisa beradaptasi dan terbiasa dengan kurikulum ini. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang baik untuk pembelajaran. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah.

“Tujuan Kurikulum 2013 adalah menyiapkan manusia Indonesia untuk hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, emosional, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.”

Untuk itu, peserta didik tidak hanya dibekali pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dibina karakternya melalui empat kompetensi yang tercakup dalam kurikulum, yaitu sosial, intelektual, pengetahuan dan keterampilan. Jadi mengapa kurikulum 2013 diganti dengan kurikulum merdeka?

Sebenarnya tidak sepenuhnya benar jika dikatakan bahwa kurikulum merdeka merupakan pengganti kurikulum 2013 karena kebaikan kurikulum 2013 masih dapat diterapkan. Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, tergantung kesiapan satuan pendidikan. Hal ini tentu positif karena ada kesenjangan mutu sekolah, sehingga tidak semua sekolah memiliki input siswa yang sama dan sarana dan prasarana penunjang yang sama, sehingga tujuan pembelajaran setiap sekolah tentu berbeda. Selain itu, kurikulum independen berfokus pada pembelajaran tentang materi-materi penting, yang memungkinkan guru memiliki lebih banyak waktu untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca dan berhitung. Guru memiliki banyak waktu untuk menentukan model, metode, dan strategi pembelajaran yang tepat bagi siswa, merancang pembelajaran dengan konten pembelajaran yang kontekstual dan menarik, menciptakan lingkungan belajar inovatif yang dapat merangsang motivasi siswa untuk belajar, dan membuat penilaian yang dapat melatih logika. Pemikiran sesuai dengan karakteristik peserta yang akan dilatih. Selain itu, siswa memiliki waktu yang cukup untuk bertanya tentang konsep yang tidak mereka pahami, sehingga kesalahpahaman tidak diharapkan terjadi.

Pembelajaran Kurikulum 2013 umumnya hanya fokus pada intrakurikuler atau tatap muka, sedangkan Kurikulum Merdeka menggunakan panduan pembelajaran intrakurikuler (70-80% dari JP) dan kokurikuler (20-30% JP) melalui proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila untuk memperkuat profil siswa Pancasila (P5). Melalui pembelajaran berbasis prodi Proyek Penguatan Profil Mahasiswa Pancasila (P5) kurikulum merdeka, mahasiswa diberi kesempatan untuk meningkatkan rasa percaya diri, membangun kerjasama dan toleransi dengan mengembangkan kreativitas untuk menciptakan karya-karya inovatif. Ini tentu saja merupakan isu yang menarik dalam kurikulum mandiri. Siswa tidak hanya sekedar menghafal di kelas, mereka berpartisipasi aktif langsung dalam proses pembelajaran meneliti masalah nyata dan mencari solusi dengan menciptakan karya yang bermanfaat.

Banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh kurikulum merdeka membuktikan bahwa pembelajaran ini secara tidak langsung telah mempersiapkan siswa untuk kebutuhan pendidikan abad ke-21. Lalu apakah urgensi atau seberapa perlunya kurikulum 2013 harus diganti dengan kurikulum merdeka. Dalam pelaksanaannya terdapat juga perbedaan dilihat dari pembuatan komponen pembelajaran RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), berikut diantaranya perbedaan proses penyusunan RPP antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka:

Konsep kurikulum merdeka tentu saja digunakan secara menyeluruh di lembaga pendidikan Indonesia saat ini. Konsep ini tidak hanya mempengaruhi perkembangan siswa, tetapi juga memudahkan guru dalam menerapkan proses pembelajaran yang inovatif. Beban yang selama ini dipikul para guru dapat diatasi dengan bantuan kurikulum merdeka. Selain itu, konsep kurikulum merdeka juga menjadi solusi untuk menjawab tantangan pendidikan di era digitalisasi saat ini. Oleh karena itu, sebagai orang yang berpendidikan kita harus mampu menjadi garda terdepan dalam perubahan kurikulum pembelajaran dalam bidang pendidikan Indonesia saat ini. Satu hal yang dapat peneliti lakukan saat ini adalah mengaktifkan kegiatan literasi di masyarakat arus utama yang dapat mengembangkan pengetahuan, kreativitas, berpikir kritis, kemampuan komunikasi yang baik dan keterampilan menggunakan perangkat berbasis teknologi. Oleh karena itu, peneliti harus mau berkontribusi dalam mensukseskan

kurikulum merdeka untuk mendukung generasi milenial yang cerdas dan komunikatif (Manalu et al., 2022).

Dari uraian diatas penulis menekankan lebih spesifik kepada mata pelajaran PPKn sebagai dampak dari perubahan tentunya terdapat perubahan dari segi nama mata pelajaran, hingga muatan – muatan materi yang ada dalam mata pelajaran PPKn yang kemudian berubah menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada jenjang Sekolah dasar.

Dikutip dari (Raharjo & Arisusila, 2021) Nadiem Makarim menjelaskan setidaknya tiga poin utama dalam gagasan merdeka belajar, yaitu teknologi untuk akselerasi, keberagaman sebagai esensi, dan profil pelajar Pancasila . Tentu saja, poin pertama terkait dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Namun ada hal yang sangat menarik yaitu di poin 2 dan 3, utamanya terkait dengan PPKn, bahwa adanya penguatan keberagaman sebagai esensi, berupa “keberagaman minat dan kemampuan yang dimiliki siswa menjadi alasan paling kuat agar pengukuran kinerja siswa tidak hanya dinilai berdasarkan angka-angka pencapaian akademik saja, tetapi juga berbagai macam aktivitas lain yang dilakukan diluar sekolah yang biasa disebut ekstrakurikuler”. Kearifan lokal juga merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Setiap siswa akan lebih memahami materi bila menggunakan pemahaman konteks lokal. “Setiap murid akan melihat semua mata pelajaran dan semua materi dalam konteks”. Kemudian terkait dengan profil pelajar Pancasila, Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud Nadiem menjelaskan salah satu mandat yang diberikan Presiden adalah penyesuaian kurikulum yang bertujuan dalam mewujudkan profil para pelajar di Indonesia. Kemendikbud telah menetapkan enam indikator sebagai profil pelajar Pancasila. Adapun enam profil diantaranya ialah pertama, bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah. Hal ini berkaitan dengan kemampuan kognitif. Kedua, kemandirian, yaitu siswa secara mandiri termotivasi meningkatkan kemampuannya, bisa memperoleh pengetahuan dan termotivasi. Ketiga, adalah kreatif, siswa harus bisa menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap keberagaman kesenian dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Faktanya, kebijakan kurikulum merdeka, dalam konteks tujuannya, tidak hanya mengakomodir strategi dan upaya pemberdayaan serta kesejahteraan bagi masyarakat saja, yang merupakan kajian utama PPKn sosio-kultural. Tetapi juga membentuk karakter siswa agar memiliki kemampuan dan kompetensi kewarganegaraan yang baik, dengan rasionalisasi, tidak hanya berfokus pada penguasaan *civic knowledge*, tetapi komprehensif, termasuk pada penguasaan *civic disposition* dan *civic skills*, sehingga menjadi warga negara yang beradab (*civic virtue*) Tentu, bangsa ini akan mendapat berbagai manfaat positif, apabila kebijakan kampus merdeka diterapkan dengan penuh komitmen dan tidak prosedural. Khususnya yang bentuk pembelajaran dalam konsep kampus merdeka yang berkaitan langsung dengan masyarakat atau yang menjadi objek kajian Pendidikan Kewarganegaraan dimensi sosio-kultural (Yuniarto et al., 2022).

Dari uraian diatas menjelaskan bagaimana urgensi kebutuhan kurikulum itu dibuat untuk meningkatkan kemampuan kewarganegaraan dalam mata pelajaran PPKn, dengan penambahan profil pelajar pancasila diharapkan dalam penerapannya bisa mengakomodir bagaimana memperbaiki sikap karakter peserta didik terhadap hasil pembelajaran juga perubahan sikap dan perilaku siswa yang lebih penting. Siswa mampu menerapkan pendidikan PPKn dalam kehidupan sehari – hari, mampu menerapkan nilai – nilai pancasila sebagai dasar negara, bersikap baik menaati segala peraturan yang ada, demi terciptanya profil pelajar pancasila sebagai hasil dari proses perubahan kurikulum PPKn menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila.

Demikian diharapkan dengan penulisan artikel ilmiah ini dapat menganalisis berbagai perubahan kurikulum yang ada menyesuaikan perkembangan zaman, tentunya dalam hal ini pemerintah telah mengkaji kebijakan yang dibuat agar senantiasa dapat berjalan dengan baik demi terciptanya pendidikan yang baik, maju dan sejahtera di Indonesia.

4. Kesimpulan

Perkembangan kurikulum PPKn di Indonesia berkembang secara dinamis senantiasa mengalami perubahan pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan serta visi-misi dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang menentukan dalam pembentukan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kekuatan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan dalam muatan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Demikian diharapkan dengan penulisan artikel ilmiah ini dapat menganalisis berbagai permasalahan perubahan kurikulum yang ada menyesuaikan perkembangan zaman, tentunya dalam hal ini pemerintah telah mengkaji kebijakan yang dibuat agar senantiasa dapat berjalan dengan baik demi terciptanya pendidikan yang baik, maju dan sejahtera di Indonesia.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Allah SWT, terima kasih kepada Dosen PPKn Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, terima kasih kepada teman-teman Prodi PPKn FKIP Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian artikel ilmiah ini.

6. Daftar Pustaka

- Alhafiz, N. (2021). Analisis profil gaya belajar siswa untuk pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 23 Pekanbaru. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*.
<https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/1203>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung ...* <http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/>
- Faiz, A., & Faridah, F. (2022). Program Guru Penggerak Sebagai Sumber Belajar. *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan*
<http://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/konstruktivisme/article/view/1876>
- Faiz, A., Parhan, M., & Ananda, R. (2022). Paradigma Baru dalam Kurikulum Prototipe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*.
<https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/2410>
- Madani, J. E. L., & Kurnia, H. (2022). Mata Pelajaran PPKn Sebagai Dasar Penerapan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Citizenship Virtues*.
<http://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/1512>
- Manalu, J. B., Sitohang, P., & ... (2022). Pengembangan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka belajar. *Prosiding Pendidikan*
<http://journal.mahesacenter.org/index.php/ppd/article/view/174>
- Raharjo, S. H., & Arisusila, I. W. (2021). Manajemen Pengembangan Profesionalisme Guru Agama Hindu Di Gugus Inti Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. *Pramana: Jurnal*

<http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pramana/article/view/1845>

Sutrisno, E. (2021). Mengenal dan Menjadi Sekolah Penggerak. In *Indonesia. Go. Id.*

Yuniarto, B., Maryanto, M., & Habibi, A. (2022). Pendidikan Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Sosial Sains.*
<https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/522>